



KEY SUCCESS FAKTOR KINERJA KEUANGAN DENGAN ANALISIS RASIO UNTUK MEWUJUDKAN EFEKTIVITAS POTENSI PENERIMAAN ASET DAERAH

Desi Susilawati*
Intan Fajar Rahmawati
Rizka Arum Rachmayanti

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
 e-mail: desisusilawati@umy.ac.id

ABSTRACT

The success in the practice of regional autonomy comes from the hard work of Regional Government in dutifully conducting financial management in accordance by the law. The problem faced in managing regional finance is the condition where certain regional potential financial resources have not been maximized. It is a fact that the budget of Sleman Regency still depends on the funding from Central Government.

This research aims to measure the independence of regional government in practicing regional autonomy in Sleman Regency by assessing the financial performance Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) based on the Budget Realization Report (LRA) for five years from 2012-2016 by analyzing the effectiveness and PAD efficiency ratio and growth ratio. This research different to others, because we briefly describe another aspect used to measure the performance of regional government is by using the effectiveness and contribution of Land and Building Tax (PBB) income ratio, as an original regional income source, it will contribute to the regional financial performance.

The result of this research shows that the relationship pattern of regional government independence is considered not independent enough, but the level of financial management efficiency is considered efficient. The degree of fiscal decentralization is considered sufficient because the realization of PAD income is very effective, However the level of regional financial dependency toward central government is considered very high. One of the factors is due to lack the contribution from Land and Building Tax Income to PAD. This situation is caused by ineffective Land and Building Tax income. The growth ratio shows that the ability of Sleman Regency Government in maintaining and improving success fluctuates.

INFO ARTIKEL

Diterima: 12 September 2018
 Direview: 26 September 2018
 Disetujui: 17 Desember 2018
 Terbit: 28 Juni 2019

Keywords:

Self-Sufficiency Ratio, Effectiveness Ratio, the Contribution of Land and Building Tax

PENDAHULUAN

Adanya otonomi daerah mengakibatkan Pemerintah Daerah mempunyai wewenang seluas-luasnya untuk menyelenggarakan dan mengatur pemerintahan yang mencakup kewenangan seperti mengatur pembangunan daerah, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan mengatur urusan pemerintahan lainnya. Keberhasilan Pemda dalam penyelenggaraan otonomi daerah tidak terlepas dari kerja keras dalam mengelola keuangan daerah secara tertib, bertanggung jawab, dan taat terhadap peraturan yang berlaku. Sedangkan menurut Halim (2012), ciri keberhasilan dalam melaksanakan otonomi daerah adalah dilihat dari kemampuan mengatur dan mengelola keuangan daerahnya. Disamping itu, menurut Yanusa (2005) ciri utama daerah telah berhasil melaksanakan otonomi daerah yaitu dilihat dari tingkat ketergantungan Pemda pada Pemerintah Pusat. Penerapan otonomi daerah diharapkan agar daerah memiliki kemampuan menggali sumber-sumber keuangan daerah, menggunakan, dan mengelola sumber keuangan dalam rangka membiayai urusan pemerintahan yang akan menentukan keberhasilan kebijakan otonomi daerah tersebut (Sanusi dan Irman, 2012). Perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terutama di sisi pendapatan daerah dapat menjadi dasar perencanaan jangka pendek (satu tahun) dengan asumsi bahwa perkembangan yang akan terjadi pada satu tahun ke depan relatif sama. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pencerminan dari potensi ekonomi daerah, untuk itu tidak berlebihan apabila pemerintah pusat menjadikan PAD sebagai kriteria utama dalam pemberian otonomi daerah (Syaparudin dan Syamsuddin, 2013).

Pembangunan negara/daerah tergantung pada kebutuhan suatu negara/daerah dan negara/daerah dapat mencari sumber pendapatan alternatif untuk membiayai pembangunan berkelanjutan tersebut. Salah satu potensi sumber pendapatan yaitu berasal dari pemungutan pajak. (Unegbu dan Ireffin dalam Yadav, dkk, 2011). Daerah otonom harus mampu mengoptimalkan potensi pendapatan daerah menjadi sumber keuangan terbesar dan mengupayakan seminimal mungkin ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat.

Pajak merupakan satu dari beberapa sumber pembiayaan pengembangan nasional. Salah satu sumber pembiayaan pembangunan dari sektor pajak yaitu berasal dari pengumpulan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diharapkan mampu berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah. Semakin tinggi penerimaan PBB di daerah, maka akan semakin meningkat pula Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut. Sehingga Pemda mampu mengurangi tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat akibat PAD yang semakin meningkat. Namun seiring dengan berjalannya waktu wajib pajak sering melakukan keterlambatan atau tidak membayarkan kepada pemungut pajak. Hal tersebut merupakan masalah yang dihadapi oleh Pemda.

Pelaksanaan otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia adalah skema desentralisasi keuangan. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi keuangan, diperlukan perimbangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemda yang adil, proposional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab. Disamping itu menurut Dollery (2009) perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemda dapat dikatakan mandiri dan efisien apabila Pemda mampu mengelola pendapatan daerah baik sektor pajak maupun pendapatan asli daerah lainnya. Semakin tinggi kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah maka semakin tinggi kemampuan Pemda dalam penyelenggaraan desentralisasi. Semakin tinggi tingkat desentralisasi semakin tinggi pula tingkat kemandirian Pemda. (Lotz, 2005) Menurut Fitriani dan Dwirandra (2014) skema desentralisasi fiskal yang digunakan di Indonesia dalam melaksanakan otonomi daerah ditengarai belum menunjang keberhasilan dalam melaksanakan otonomi daerah dan belum sepenuhnya mampu menggali sumber pendapatan daerah. Data APBD yang bersifat absolut belum sepenuhnya menyediakan kebutuhan informasi mengenai kinerja keuangan daerah. Sehingga dalam rangka mengukur kinerja keuangan Pemda serta untuk memastikan kehati-hatian dan akuntabilitas keuangan Pemda, diperlukan audit dan evaluasi tahunan keuangan oleh Pemda. (Olurankinse, 2012)

Dalam rangka mengetahui kinerja Pemerintahan daerah peneliti tertarik untuk mengkaji menggunakan analisis berbasis rasio. Disamping itu menurut Widodo (dalam Halim, 2012) analisis rasio telah banyak digunakan oleh lembaga perusahaan yang bersifat komersial sebagai alat analisis

keuangan, berbeda dengan lembaga publik yaitu pemerintah daerah penggunaan analisis rasio masih sangat terbatas.

Tabel 1
Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemda
di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012

Pemda	Realisasi Pendapatan (Juta Rupiah)	Realisasi Belanja (Juta Rupiah)	Surplus/ Defisit (Juta Rupiah)	Ratio Pendapata n terhadap Belanja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
D. I. Yogyakarta	2.171.7234,3	2.053.825,96	117.908,35	1,06
Kab. Kulonprogo	1	881.690,25	896,41	1,00
Kab. Bantul	882.586,66	1.282.878,38	54.692,34	1,04
Kab. Gunungkidul	1.337.570,72	1.073.158,31	3.343,69	1,00
Kab. Sleman	1.076.502,00	1.421.401,17	168.321,80	1,12
Kota Yogyakarta	1.589.722,97	1.023.949,92	134.184,88	1,13

Sumber: Badan Pusat Statistik Yogyakarta, 2018

Berdasarkan Tabel 1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemda di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012, Pemda Kabupaten Sleman merupakan kabupaten dengan realisasi pendapatan terbesar diantara kabupaten/kota lainnya di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu mencapai nilai 1,59 triliun rupiah. Kemudian pada tahun tersebut kabupaten ini mengalami surplus anggaran sebesar 168,32 miliar rupiah karena realisasi belanja sebesar 1,42 miliar rupiah. Pemilihan Kabupaten Sleman sebagai objek penelitian didukung dengan adanya data menurut data Badan Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta (BPS DIY) pada Tabel 2. yang menyebutkan bahwa Kabupaten Sleman merupakan kabupaten dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan dan Belanja Pemda yang terus menerus mengalami kenaikan dari tahun 2011-2015. Menurut data tersebut realisasi PAD terhadap Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman meningkat dari 17,29 persen pada tahun 2011 menjadi 28,03 persen pada tahun 2015.

Tabel 2
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta Persentasenya
terhadap Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah di DIY 2015

Pemerintah Daerah	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
D. I. Yogyakarta	54,02	46,23	38,87	46,65	46,86
Kab. Kulonprogo	6,79	8,39	9,57	14,16	13,92
Kab. Bantul	10,92	12,46	14,75	19,70	20,02
Kab. Gunungkidul	5,64	6,23	6,72	11,60	12,26
Kab. Sleman	17,29	18,94	23,65	27,61	28,03
Kota Yogyakarta	24,05	29,26	29,25	32,24	35,60

Sumber: Badan Pusat Statistik Yogyakarta

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi aspirasi bagi daerah lain untuk lebih meningkatkan kinerja dan kemandirian di sektor keuangan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah yang salah satunya bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan. Mengenai hal tersebut diharapkan PAD harus menjadi kontribusi terbesar dalam mobilisasi dana penyelenggaraan Pemda.

Mengingat banyak aspek yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan Pemda, maka penulis memberikan batasan masalah, yaitu menilai kinerja keuangan BKAD Kabupaten Sleman berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) periode 2012-2016 dengan menggunakan analisis rasio efektivitas dan efisiensi PAD, rasio efisiensi belanja daerah, dan rasio pertumbuhan. Disamping itu aspek yang digunakan peneliti untuk menilai efektivitas kinerja BKAD Kabupaten Sleman terkait optimalisasi dan kontribusi penerimaan Asli Daerah yang bersumber dari penerimaan PBB dengan menggunakan analisis rasio efektivitas dan rasio kontribusi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) menilai efektivitas kinerja keuangan BKAD Kabupaten Sleman berdasarkan analisis ratio; (2) mengukur kontribusi sumber pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan dalam pembentukan pendapatan daerah Kabupaten Sleman; (3) menganalisis efektivitas pertumbuhan serta perkembangan pemerintah daerah dalam perolehan pendapatan dan pengeluaran daerah Kabupaten Sleman selama tahun 2012-2016.

KONTRIBUSI PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi tentang pemahaman analisis kinerja keuangan untuk publik khususnya pada BKAD Kabupaten Sleman.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dalam melakukan perbaikan bagi BKAD Kabupaten Sleman terutama dalam meningkatkan efektivitas penerimaan PBB untuk memberikan kontribusi yang lebih efektif sebagai PAD. Penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan evaluasi dan informasi dan *Transfer Knowledge* bagi pembuat kebijakan instansi yang berkaitan. Disamping itu hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan referensi atau acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya, khususnya tentang analisis kinerja keuangan.

Daling (2013) Kinerja pendapatan dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara belum cukup baik, dapat dilihat dari pendapatan periode 2009-2011 yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. PAD yang tidak signifikan menjadi salah satu faktor pendorong pendapatan yang kurang terealisasi dari yang telah dianggarkan. Kinerja belanja dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara sudah baik, dikarenakan belanja yang realtif kecil ditambah dengan penghematan belanja yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara sehingga mendapatkan SiLPA surplus yang nantinya bisa digunakan untuk pembangunan daerah dan lain sebagainya. Persamaan dengan penelitian ini adalah analisis kinerja keuangan APBD, namun perbedaannya adalah pada objek penelitian.

Hasil yang senada juga dinyatakan Hanik dan Karyanti (2014), kinerja keuangan daerah DPPKAD Kabupaten Semarang sudah cukup baik. Terlihat dari kemandirian daerah yang masih rendah sekali (instruktif) namun terus mengalami kenaikan. Pemungutan PAD cenderung efektif dan untuk rasio efisiensi sudah efisien dalam mengeluarkan biaya insentif untuk memungut PAD secara maksimal. Rasio aktivitas pada DPPKAD Kabupaten Semarang masih diprioritaskan untuk belanja rutin dibandingkan untuk belanja pembangunan. Pada rasio pertumbuhan menunjukkan bahwa DPPKAD Kabupaten Semarang mampu mempertahankan kinerjanya dalam mengelola keuangan. Perbedaannya dengan penelitian berikut adalah metode analisis rasio yang digunakan lebih beragam dan membahas kontribusi PBB terhadap PAD.

Untuk mewujudkan kemandirian keuangan dan peningkatan pelayanan prima, harus didukung dengan penerimaan khususnya penerimaan asli daerah. Sehingga daerah mampu membiayai kebutuhan keuangannya sendiri. Untuk itu setiap daerah dituntut untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri yang lebih dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi, pajak reklame dan Pajak Bumi dan Bangunan. seberapa besar kontribusi masing-masing komponen terhadap total penerimaan daerah yang mana merupakan indikator kekuatan suatu daerah untuk dapat menyelenggarakan pemerintah di daerah. Adanya perbedaan sumber daya alam (SDA) bagi setiap daerah akan mengakibatkan adanya perbedaan dalam jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan diterima guna membiayai kegiatan operasional pemerintah daerah. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan semakin kecil ketergantungan daerah tersebut terhadap sumber-

sumber penerimaan lain seperti bantuan yang berasal dari pemerintah yang lebih tinggi (Putra dan Hidayat, 2016)

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena menghubungkan efektivitas kinerja keuangan dengan kontribusi Penerimaan PBB sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah, Penelitian ini bertujuan juga untuk menguji efektivitas dan kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai Penerimaan Asli Daerah untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah. Berikut penelitian terdahulu yang memotivasi penulis. Harefa, (2016) mengemukakan bahwa efektivitas pemungutan PBB-P2 yang telah dilaksanakan oleh Dispenda melalui UPT khusus PBB Kota Makassar menunjukkan kriteria “sangat efektif”, namun demikian proporsi dari sisi penerimaan masih rendah. Kenaikan penerimaan tersebut semata-mata adanya kebijakan menaikkan tarif PBB yang diberlakukan oleh Pemkot. Sedangkan sumbangan atau kontribusi PBB tahun 2012-2014 menunjukkan bahwa peran penerimaan PBB terhadap realisasi PAD Kota Makassar termasuk dalam kriteria masih rendah.

Hasil senada ditunjukkan oleh Damaiyanti dan Setiawan, (2014), Wardani dan Fadhlia, (2017) mengemukakan bahwa efektivitas penerimaan PBB tahun 2009-2013 Kota Denpasar sangat efektif yaitu 121,42 persen, demikian juga penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Aceh Besar mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan rata-rata presentase sebesar 100.10%.

Kontribusi penerimaan PBB dikota Denpasar terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukkan hasil kurang dengan rata-rata dibawah 50 persen, yaitu 18,62 persen.

Meskipun dikategorikan sangat efektif akan tetapi pemerintah belum bisa dikatakan berhasil dalam pengelolaan PBB-P2 karena setiap tahun target yang ditetapkan sama tidak ada peningkatan.

Namun sebaliknya Pertiwi, dkk, (2014) mengemukakan Efektivitas pemungutan PBB di Kota Probolinggo secara keseluruhan ini kurang efektif, karena selama 6 tahun dari tahun 2008-2013 belum pernah mencapai target penerimaan yang telah ditentukan.

Penelitian diatas menunjukkan tingkat efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, di beberapa daerah menunjukkan hasil yang berbeda, sehingga peneliti tertarik untuk lebih dalam mengkaji bagaimana kontribusi Penerimaan PBB sebagai Pendapatan Asli Daerah di kabupaten Sleman. Perbedaan dari penelitian ini terdapat pada wilayah tempat penelitian dan tahun penelitian. Penelitian ini yang diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi dan informasi bagi pembuat kebijakan instansi yang berkaitan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk memberikan gambaran yang faktual, akurat dan mengenai fakta-fakta keadaan yang sebenarnya.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BKAD Kabupaten Sleman Tahun 2012-2016, angka realisasi dan target penerimaan PBB Kabupaten Sleman Tahun 2012-2016. Data Kualitatif berupa gambaran umum BKAD Kabupaten Sleman. Dilihat dari sumbernya maka pengumpulan data menggunakan data primer sebagai dasar dalam analisis kinerja keuangan, serta menggunakan data sekunder berupa LRA Tahun 2012-2016, angka realisasi dan target penerimaan PBB Kabupaten Sleman Tahun 2012-2016. Pemda.

Metode analisis data yang dipilih yaitu:

1. Menghitung rasio keuangan daerah pada BKAD Kabupaten Sleman dengan menggunakan: (1) Rasio efektivitas PBB; (2) Kontribusi PBB terhadap PAD; (3) Rasio efektivitas PAD; (4) Rasio efisiensi PAD; (5) Rasio efisiensi belanja; dan (6) Rasio pertumbuhan.
2. Membandingkan dan menganalisis hasil perhitungan rasio dari masing-masing periode.
3. Menarik kesimpulan atas perhitungan rasio keuangan daerah berdasarkan informasi kriteria masing-masing rasio.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil dari analisis kinerja keuangan tersebut yaitu sebagai berikut:

Rasio Efektivitas PBB

Efektivitas digunakan untuk mengukur berhasil tidaknya pemerintah dalam mencapai tujuannya, maka pemerintah tersebut dapat dikatakan telah berjalan efektif. Efektivitas dalam pemungutan PBB merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan PBB terhadap target penerimaan PBB.

Tabel 3
Kriteria Efektivitas PBB

No	Efektivitas	Kategori
1	>100 %	Sangat Efektif
2	90 % - 100 %	Efektif
3	80 % - 90 %	Cukup Efektif
4	60 % - 80 %	Kurang Efektif
5	<60 %	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327

Rumus yang digunakan yaitu:

Rasio Efektivitas PBB

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Target Penerimaan PBB}} \times 100\%$$

Tabel 4
Efektivitas Penerimaan PBB Kabupaten Sleman Tahun 2012-2016

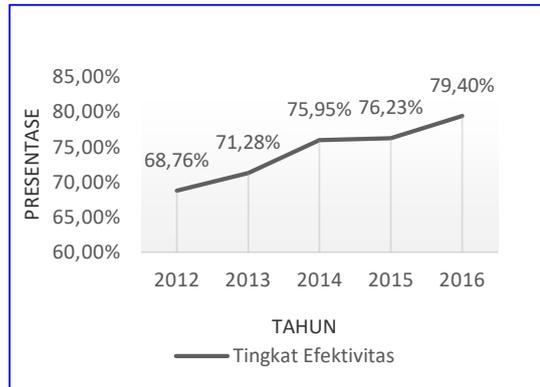
No	Tahun	Target PBB (Rp)	Realisasi PBB (Rp)	Presentase	Kriteria
1	2012	67.994.194.434	46.754.235.247	68,76%	Kurang Efektif
2	2013	70.958.598.559	50.579.252.687	71,28%	Kurang Efektif
3	2014	71.810.888.953	54.542.462.311	75,95%	Kurang Efektif
4	2015	70.554.497.903	53.786.981.221	76,23%	Kurang Efektif
5	2016	74.764.438.758	59.365.576.173	79,40%	Kurang Efektif
Rata-rata				61,94%	Kurang Efektif

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 4 tingkat efektivitas penerimaan PBB rata-rata dari tahun 2012-2016 dikategorikan kurang efektif, karena realisasi penerimaan PBB tidak melebihi dari target yang telah ditetapkan. Semakin tinggi efektivitas PBB berarti menggambarkan realisasi penerimaan PBB semakin besar dan pencapaian target PBB cukup baik. Disetiap tahunnya efektivitas penerimaan PBB mengalami kenaikan, tetapi dari tahun 2012-2016 belum ada yang melampaui target penerimaan PBB. Pengelolaan PBB terakhir yang dikelola oleh pemerintah pusat pada tahun 2012 tersebut realisasi penerimaan hampir mencapai Rp 46,8 milyar dengan presentase 68,76% yang dikategorikan kurang efektif. Sedangkan pada tahun 2013-2016 pengelolaan PBB yang sudah menjadi pajak daerah terus mengalami kenaikan disetiap tahunnya. Tetapi, dengan melihat rata-rata efektivitas sebesar 61,94%, hal ini menunjukkan bahwa kinerja dalam pemungutan PBB di Kabupaten Sleman belum baik karena kurang efektif. Ditinjau dari segi penerimaan PBB, diperlukan upaya yang konkrit dari pihak BKAD Kabupaten Sleman agar lebih efektif dalam pemungutannya dengan pendataan ulang Objek PBB secara berkala dan dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara intensif kepada

petugas pemungut tingkat kecamatan dan kelurahan untuk lebih aktif dalam pelaksanaan pemungutan PBB.

Berikut grafik efektivitas penerimaan PBB tahun 2012-2016:



Sumber: Data diolah, 2018

Gambar 1
Efektivitas Penerimaan PBB

Kontribusi PBB pada PAD

PBB merupakan salah satu komponen dari pajak daerah yang potensial. Tidak sedikit jumlah penerimaan PBB yang masuk dalam penerimaan pajak daerah setiap tahunnya. Untuk mengetahui besarnya kontribusi PBB terhadap pendapatan asli daerah dapat dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan PBB dengan total realisasi penerimaan PAD, dapat dirumuskan sebagai berikut:

Kontribusi PBB

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Tabel 5
Kriteria Kontribusi

No	Presentase	Kategori
1	0,00 % - 10 %	Sangat kurang
2	10,10 % - 20 %	Kurang
3	20,10 % - 30 %	Sedang
4	30,10 % - 40 %	Cukup Baik
5	40,10 % - 50 %	Baik
6	>50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327

Dari Tabel 6 diketahui kontribusi PBB terhadap PAD Kabupaten Sleman pada tahun 2012 yaitu sebesar 15,53% merupakan tahun dengan kontribusi PBB terhadap PAD tertinggi pada 5 tahun terakhir dan kontribusi rata-rata kontribusi PBB terhadap PAD sangat kurang berkontribusi yaitu hanya sebesar 8,79%. Hal tersebut dikarenakan masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya membayar PBB P2 itu sendiri.

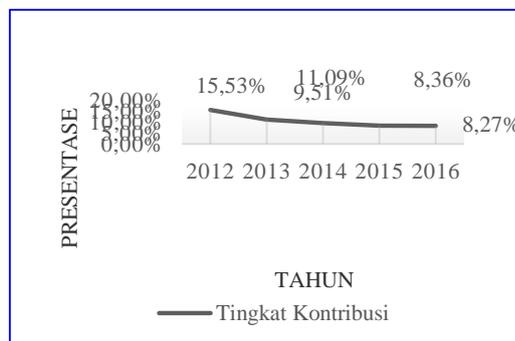
Tabel 6
Kontribusi PBB Terhadap PAD Kabupaten Sleman Tahun 2012-2016

No	Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi PBB (Rp)	Kontribusi	Kriteria
1	2012	301.069.539.284,13	46.754.235.247	15,53%	Kurang
2	2013	456.026.490.587,83	50.579.252.687	11,09%	Kurang
3	2014	573.343.496.413,11	54.542.462.311	9,51%	Sangat Kurang
4	2015	643.111.042.141,03	53.786.981.221	8,36%	Sangat Kurang
5	2016	717.672.384.751,55	59.365.576.173	8,27%	Sangat Kurang
Rata-rata				8,79%	Sangat Kurang

Sumber: Data diolah, 2018

BKAD Kabupaten Sleman telah berupaya untuk meningkatkan kontribusi PBB dengan melakukan update data dan menggali potensi baru melalui kegiatan pendataan ke lapangan. Pemerintah daerah tidak hanya melakukan update data akan tetapi pemerintah dapat melakukan sosialisasi, sehingga dapat diketahui penyebab masyarakat tidak membayar PBB P2. Selain melakukan sosialisasi, pemerintah dapat memasang spanduk mengenai pembayaran PBB P2 yang diharapkan dapat mampu meningkatkan realisasi penerimaan PBB, dan dapat berkontribusi baik terhadap PAD.

Dalam menentukan target ketetapan dari PBB yang akan mempengaruhi dari realisasi PAD, BKAD Kabupaten Sleman melihat dari potensi atau perilaku dari realisasi piutang/ tunggakan PBB setiap tahunnya seperti apa. Secara akuntansi jika realisasi lebih kecil dari target maka akan mengakibatkan membesarnya nilai piutang dan piutang tersebut juga nantinya akan sulit dilakukan penagihan karena data belum sesuai.



Sumber: Data diolah, 2018

Gambar 2
Kontribusi PBB terhadap PAD

Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD mengukur kinerja Pemda dalam merealisasi penerimaan PAD yang telah dirancang dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi asli daerah. (Halim, 2012: L-6). Rumus rasio ini adalah:

Rasio Efektivitas PAD

$$= \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Berikut tabel katagori efektivitas PAD.

Tabel 7
Kategori Efektivitas PAD

No	Kategori	Efektivitas
1.	Tidak Efektif	<60%
2.	Kurang Efektif	60%-80%
3.	Cukup Efektif	80%-90%
4.	Efektif	90%-100%
5.	Sangat Efektif	>100%

Sumber: Mega Pratidina, 2013 (dalam Fitriani, 2014)

Dari Tabel 8 dapat dilihat bahwa rasio efektivitas Kabupaten Sleman dalam melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan sumber PAD. Rasio Efektivitas tertinggi pada tahun 2013 yaitu 131,02 persen dengan kategori sangat efektif. Rata-rata rasio efektivitas Kabupaten Sleman selama tahun 2012-2016 adalah 119,71 pada kategori sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa Pemda Kabupaten Sleman dalam merealisasikan penerimaan PAD selama tahun 2012-2016 sudah baik dan mencapai target yang direncanakan. Namun, kenaikan rasio efektivitas PAD sebanding dengan meningkatnya anggaran PAD yang ditargetkan oleh Pemda Kabupaten Sleman. Jadi, sudah sewajarnya Pemda dipandang efektif dalam merealisasikan PAD. Komponen/bagian daerah yang berkontribusi terhadap kenaikan PAD salah satunya yaitu PBB.

Namun setelah dihitung kontribusi PBB terhadap PAD, hasilnya masih sangat jauh dari harapan

Tabel 8
Perhitungan Rasio Efektivitas PAD

Tahun	Target Penerimaan PAD / Anggaran PAD	Realisasi PAD	Rasio	Keterangan
2012	241.003.081.720,31	301.069.539.284,13	124,92	Sangat Efektif
2013	342.895.307.197,81	449.270.304.864,83	131,02	Sangat Efektif
2014	474.917.917.941,46	573.337.599.560,11	120,72	Sangat Efektif
2015	577.585.009.141,24	643.130.079.828,03	111,35	Sangat Efektif
2016	648.841.915.155,32	717.151.176.028,57	110,53	Sangat Efektif
Rata-Rata			119,71	Sangat Efektif

Sumber: Data diolah, 2018

yaitu sebesar 8,79% tergolong sangat kurang berkontribusi. Pemda Sleman masih perlu melakukan optimalisasi pemungutan PBB agar mampu berkontribusi dalam peningkatan PAD, kurang berkontribusinya PAD terhadap PAD disebabkan pula oleh masih kurang efektif penerimaan PBB di Kabupaten Sleman. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan keuangan Daerah Kabupaten Sleman terhadap dana eksternal masih tinggi.

Dari hasil perhitungan rasio efektivitas PAD diatas dapat dicari pertumbuhan rasio efektivitas PAD Kabupaten Sleman. Rumus yang digunakan yaitu:

Pertumbuhan Rasio Efektivitas PAD

$$= \frac{\text{REPAD1} - \text{REPAD0}}{\text{REPAD0}} \times 100\%$$

Keterangan:

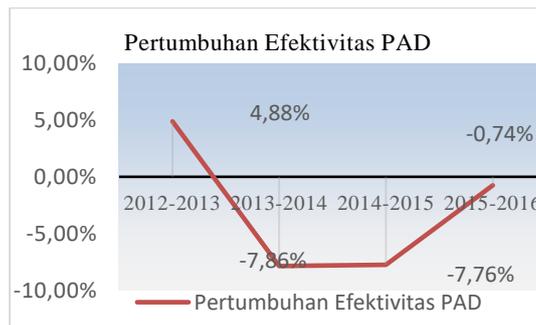
REPAD1 = Rasio Efektivitas PAD
Tahun ke n

REPAD0 = Rasio Efektivitas PAD
Tahun Sebelumnya (n-1)

Tabel 9
Perhitungan Pertumbuhan
Rasio Efektivitas PAD

Tahun	Pertumbuhan Efektivitas PAD
2012-2013	4,88%
2013-2014	-7,86%
2014-2015	-7,76%
2015-2016	-0,74%
Rata-Rata	-0,03%

Sumber: Data diolah, 2018



Sumber: Data diolah, 2018

Gambar 3
Pertumbuhan Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Sleman

Berdasarkan Gambar 3 Efektivitas PAD Pemda Kabupaten Sleman tahun 2012-2016 mengalami perkembangan yang fluktuatif (berubah-ubah). Tingkat Pertumbuhan Efektivitas PAD pada tahun 2012-2016 cenderung stagnan dan tidak mengalami kenaikan yang berarti. Pertumbuhan terbesar yaitu pada tahun 2013 dengan mengalami kenaikan sebesar 4,88%. Setelah tahun 2013 pertumbuhan rasio efektivitas PAD justru mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Sehingga agar pertumbuhan rasio efektivitas PAD stabil Pemda Kabupaten Sleman sebaiknya meningkatkan penerimaan PAD dengan memperhatikan penerimaan PAD pada tahun sebelumnya.

Rasio Efisiensi PAD

Rasio Efisiensi PAD (REPAD) menunjukkan perbandingan besar belanja yang dikeluarkan untuk memungut PAD dengan realisasi penerimaan PAD yang diterima. (Halim, 2012: L-7). Rumus yang digunakan yaitu:

$$\begin{aligned}
 & \text{REPAD} \\
 &= \frac{\text{Belanja untuk Memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%
 \end{aligned}$$

Tabel 10
Kategori Efisiensi PAD

No	Kategori	Efisiensi
1.	Tidak Efisien	>100%
2.	Kurang Efisien	90%-100%
3.	Cukup Efisien	80%-90%
4.	Efisien	60%-80%
5.	Sangat Efisien	<60%

Sumber: Kepemendagri No. 690.900.327 tahun 1996 (dalam Pramono, 2014)

Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintahan semakin baik. Berdasarkan Tabel 11 diketahui Rasio Efisiensi PAD Kabupaten Sleman pada tahun 2012 yaitu sebesar 21,18% merupakan tahun terendah pada 5 tahun terakhir dan rasio tertinggi yaitu pada tahun 2014 yaitu sebesar 30,23%. Rata-rata efisiensi PAD dikategorikan efisien karena telah mencapai 26,95%. Rasio Efisiensi PAD Kabupaten Sleman dari tahun 2012-2016 selalu mengalami perubahan namun tidak signifikan namun masih dalam kategori cukup efisien. Menurut perhitungan Rasio

Tabel 11
Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Tahun	Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD	Realisasi PAD	Rasio	Keterangan
2012	1.421.401.170.875,33	301.069.539.284,13	21,18	Cukup Efisien
2013	1.693.528.297.005,79	449.270.304.864,83	26,53	Cukup Efisien
2014	1.896.477.377.488,36	573.337.599.560,11	30,23	Cukup Efisien
2015	2.328.751.919.925,33	643.130.079.828,03	27,62	Cukup Efisien
2016	2.455.446.948.874,20	717.151.176.028,57	29,21	Cukup Efisien
Rata-Rata			26,95	Cukup Efisien

Sumber: Data diolah, 2018

Efisiensi PAD Daerah Kabupaten Sleman dapat dikatakan sangat efisien ketika mencapai nilai kurang dari 60%. Dari perhitungan tersebut dapat dilihat jika biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD sudah efisien karena realisasi PAD mencapai lebih dari 20%.

Dari hasil perhitungan Rasio Efisiensi PAD diatas dapat dicari pertumbuhan Rasio Efisiensi PAD Kabupaten Sleman.

Rumus yang digunakan yaitu:

$$\frac{\text{REPAD1} - \text{REPAD0}}{\text{REPAD0}} \times 100\%$$

Keterangan:

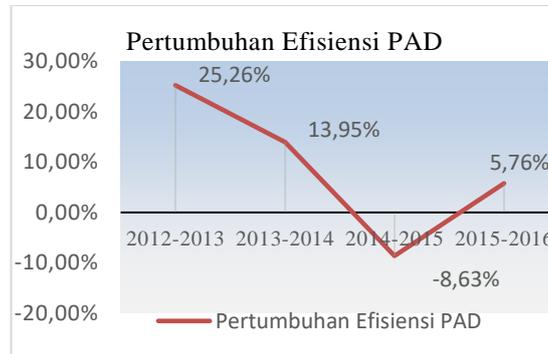
REPAD1 = Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Tahun ke n

REPAD0 = Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Tahun Sebelumnya (n-1)

Tabel 12
Perhitungan Pertumbuhan
Rasio Efisiensi PAD

Tahun	Pertumbuhan Efisiensi PAD
2012-2013	25,26%
2013-2014	13,95%
2014-2015	-8,63%
2015-2016	5,76%
Rata-Rata	0,09%

Sumber: Data diolah, 2018



Sumber: Data diolah, 2018

Gambar 4
Pertumbuhan Rasio Efisiensi PAD Kabupaten Sleman

Berdasarkan Gambar 4 Efisiensi PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman tahun 2006-2015 mengalami perkembangan yang fluktuatif (berubah-ubah). Tingkat Pertumbuhan Efisiensi PAD meningkat tajam pada tahun 2013 yaitu mencapai 25%. Pada tahun 2014 dan 2015 pertumbuhan rasio efisiensi PAD mengalami penurunan. Penurunan terbesar yaitu pada tahun 2015 yaitu turun sebesar 8%.

Rasio Efisiensi Belanja Daerah

Rasio efisiensi belanja bertujuan mengukur tingkat penghematan anggaran oleh Pemda. Rasio ini dapat diperoleh dengan membandingkan realisasi belanja dengan anggaran belanja.

Tabel 13
Kategori Efisiensi Belanja Daerah

No	Kategori	Efisiensi
1.	Tidak Efisien	>100%
2.	Kurang Efisien	90%-100%
3.	Cukup Efisien	80%-90%
4.	Efisien	60%-80%
5.	Sangat Efisien	<60%

Sumber: Abdul Halim, 2007 (dalam Vendra, 2015)

Rumus rasio ini adalah:

Tabel 14
Perhitungan Rasio Efisiensi Belanja

Tahun	Anggaran Belanja Daerah	Realisasi Belanja Daerah	Rasio	Keterangan
2012	1.595.739.879.570,00	1.421.401.170.875,33	89,07	Cukup Efisien
2013	1.946.380.363.064,13	1.693.528.297.005,79	87,01	Cukup Efisien
2014	2.288.645.856.460,56	1.896.477.377.488,36	82,86	Cukup Efisien
2015	2.770.882.731.330,03	2.328.751.919.925,33	84,04	Cukup Efisien
2016	2.647.865.812.373,38	2.455.446.948.874,20	92,73	Kurang Efisien
	Rata-Rata		87,15	Cukup Efisien

Sumber: Data diolah, 2018

Rasio Efisiensi Belanja

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Dari Tabel 14 dapat dilihat bahwa rasio efisiensi belanja Kabupaten Sleman dalam rangka melakukan penghematan anggaran oleh Pemda Kabupaten Sleman sudah cukup Efisien. Hal tersebut dapat dilihat dari rata-rata efisiensi belanja dari tahun 2012-2016 yaitu sebesar 87,15 termasuk kedalam kategori cukup efisien.

Rasio efisiensi belanja tertinggi pada tahun 2016 yaitu 92,73 persen dengan kategori kurang efisien. Semakin tinggi hasil perhitungan rasio efisiensi belanja menandakan semakin inefisiensi suatu Pemda dalam menghemat anggarannya. Atau dapat dikatakan belanja terlalu besar. Sehingga Pemda Kabupaten Sleman masih perlumenekan pengeluaran belanja daerah agar dapat dikatakan efisien dalam penghematan anggaran.

Dari hasil perhitungan Rasio Efisiensi Belanja tersebut dapat dicari pertumbuhan Rasio Efisiensi Belanja Kabupaten Sleman. Adapun rumus yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan Rasio Efisiensi Belanja yaitu:

Pertumbuhan Rasio Efisiensi Belanja

$$\frac{\text{REB1} - \text{REB0}}{\text{REB0}} \times 100\%$$

Keterangan:

REB1 = Rasio Efisiensi Belanja Daerah Tahun ke n

REB0 = Rasio Efisiensi Belanja Daerah Tahun Sebelumnya (n-1)

Tabel 15
Perhitungan Pertumbuhan
Rasio Efisiensi Belanja Daerah

Tahun	Pertumbuhan Efisiensi Belanja
2012-2013	-2,31%
2013-2014	-4,77%
2014-2015	1,42%
2015-2016	10,34%
Rata-Rata	0,011%

Sumber: Data diolah, 2018



Sumber data: Diolah, 2018

Gambar 5
Pertumbuhan Rasio Efisiensi Belanja Kabupaten Sleman

Berdasarkan Gambar 5 pertumbuhan rasio efisiensi belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman tahun 2012-2016 mengalami perkembangan yang signifikan. Tingkat Pertumbuhan Efisiensi Belanja meningkat tajam pada tahun 2016. Hal tersebut menggambarkan jika Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman belum mampu melakukan penghematan anggaran karena belanja daerah semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. (Halim, 2012: L-12).

Rumus Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut:

$$= \frac{P_n - P_0}{P_0} \times 100\%$$

Keterangan:

r = Rasio Pertumbuhan

P_n = Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Modal/Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-n

P₀ = Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Modal/Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum n)

Tabel 16
Perhitungan Rasio Efisiensi Belanja

Ket	20Tahun Anggaran				
	12	2013	2014	2015	2016
Pendapatan	1.589.722.974.409, 13	1.899.525.636.838, 83	2.076.820.131.084, 13	2.294.622.764.756, 12	2.329.097.456.006,8 0
Rasio Pertumbuhan Pendapatan		19,49	9,33	10,49	1,50
PAD	301.069.539.284,1 3	449.270.304.864,83	573.337.599.560,11	643.130.079.828,03	717.151.176.028,57
Rasio Pertumbuhan PAD		49,22	27,62	12,17	11,51
Belanja Operasi	1.241.689.260.072, 05	1.420.339.683.204, 62	1.792.142.435.143, 27	1.726.852.579.468, 64	1.900.585.606.945,6 7
Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi		14,39	26,18	(3,64)	10,06
Belanja Modal	132.536.252.044,0 0	206.859.865.136,17	282.862.049.259,00	426.782.827.408,85	344.002.326.231,33
Rasio Pertumbuhan Belanja Modal		56,08	36,74	50,88	(19,40)

Sumber: Data diolah, 2018

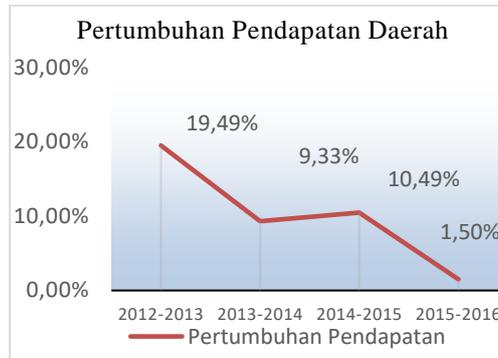
Menurut Tabel 16 Secara keseluruhan tingkat pertumbuhan Pendapatan Daerah dan PAD BKAD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2012-2016 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Artinya, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman telah dapat dikatakan mampu mempertahankan dan meningkatkan pendapatan daerah. Pendapatan daerah naik seiring dengan PAD yang naik dari tahun ke tahun. Sedangkan Pertumbuhan Pendapatan Daerah BKAD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2012-2016 fluktuatif. Dari tahun 2012-2014 pertumbuhan pendapatan daerah menunjukkan pertumbuhan yang positif namun mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 pertumbuhan pendapatan daerah mengalami kenaikan sebesar 1,13% menjadi 10,49%, kemudian pada tahun 2016 turun menjadi sebesar 1,5%. Rata-Rata kenaikan Pendapatan Daerah selama Tahun Anggaran 2012-2016 yaitu sebesar 12,41%.

PAD Kabupaten Sleman mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, namun pertumbuhannya tidak signifikan. Tahun 2012 PAD Kabupaten Sleman mengalami kenaikan sebesar 32,79% lalu pada tahun 2013 naik menjadi 49,22%. Namun dari tahun 2014-2016 diketahui pertumbuhan PAD Kabupaten Sleman mengalami penurunan. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman perlu mengoptimalkan lagi penerimaan PAD agar pertumbuhannya semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Selain pendapatan, pertumbuhan belanja modal Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2012-2016 fluktuatif. Pertumbuhan terkecil yaitu pada tahun 2016 hingga mencapai -19,40%. Pergerakan pertumbuhan yang menurun tersebut terjadi seiring dengan anggaran belanja modal yang berkurang dan karena BKAD Kabupaten Sleman belum mampu merealisasikan pos belanja modal secara maksimal, meliputi: (1) belanja tanah; (2) belanja peralatan dan mesin; (3) belanja gedung dan pembangunan; (4) belanja jalan, irigasi, dan jaringan; dan (5) belanja aset lainnya. Hal tersebut terlihat pada laporan realisasi anggaran tahun 2015 dan 2016.

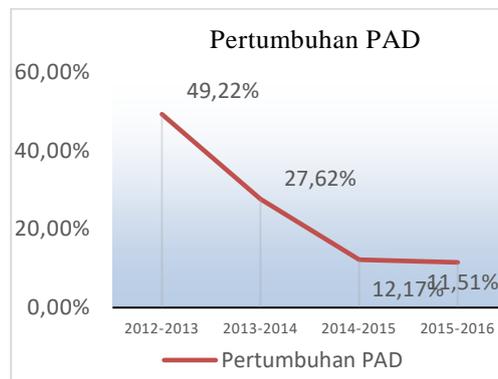
Pertumbuhan belanja operasional Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2012-2016 yaitu fluktuatif dan menunjukkan pertumbuhan yang positif. Namun, pada tahun 2015 biaya operasional Kabupaten Sleman mengalami penurunan yang sangat pesat yaitu sebesar 3,64% atau anjlok sebesar 29,83% dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2016 mengalami kenaikan yaitu mencapai 13,7% sehingga menjadi 10,06%.

Berikut grafik pertumbuhan masing-masing rekening:



Sumber: Data diolah, 2018

Gambar 6
Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012-2016



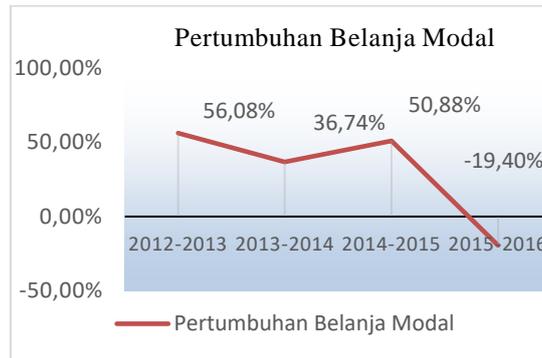
Sumber: Data diolah, 2018

Gambar 7
Pertumbuhan PAD Kabupaten Sleman Tahun 2012-2016



Sumber: Data diolah, 2018

Gambar 8
Pertumbuhan Belanja Operasional Kabupaten Sleman Tahun 2012-2016



Sumber: Data diolah, 2018

Gambar 9
Pertumbuhan Belanja Modal Kabupaten Sleman Tahun 2012-2016

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis menarik kesimpulan:

1. Tingkat efisiensi penerimaan PAD di Kabupaten Sleman sudah sangat efisien. Tingkat efektivitas penerimaan PAD di Kabupaten Sleman sudah sangat efektif. Tingkat efisiensi belanja daerah Kabupaten Sleman selama tahun 2012-2016 sudah cukup efisien. Hal tersebut juga disampaikan oleh Hanik dan Karyanti (2014) bahwa Penerimaan PAD di DPPKAD Kabupaten Semarang sangat efektif.
2. Penerimaan PBB setiap tahun mengalami peningkatan. Namun masih dalam kategori kurang efektif. Kontribusi PBB terhadap PAD di Kabupaten Sleman mengalami penurunan dan dikategorikan sangat kurang, dikarenakan pertumbuhan penerimaan PAD lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan PBB. Hasil ini berbeda dengan Damaiyanti dan Setiawan (2014) mengemukakan bahwa penerimaan PBB dan kontribusi PBB terhadap PAD di Kota Denpasar termasuk dalam kriteria sangat efektif, namun kurang berkontribusi terhadap PAD.
3. Perlunya pendataan ulang wajib pajak dan peningkatan kinerja pegawai merupakan salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan PBB dan meningkatkan kontribusi PBB terhadap PAD. Hal senada juga disampaikan oleh Wardani dan Fadila (2017) bahwa kontribusi PBB terhadap PAD di Kabupaten Aceh Besar masih kurang. Hal tersebut karena sumber-sumber penerimaan PBB belum tergali secara maksimal dan pertumbuhan PAD lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan PBB. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Fadila (2017) dan Harefa (2016) yang menyatakan bahwa efektivitas penerimaan PBB di Kabupaten Aceh Besar dan Kota Makassar mengalami peningkatan disetiap tahunnya sehingga masuk dalam kategori sangat efektif.
4. Rasio pertumbuhan Pemda Kabupaten Sleman dalam perolehan pendapatan dan pengeluaran daerah selama tahun 2012-2016 fluktuatif., namun sudah dapat dikatakan efektif. Hasil penelitian tersebut senada dengan penelitian yang dilakukan Hanik dan Karyanti (2014) di Kabupaten Semarang bahwa pada rasio pertumbuhan menunjukkan bahwa DPPKAD Kabupaten Semarang mampu mempertahankan kinerjanya dalam mengelola keuangan.

SARAN

1. BKAD Kabupaten Sleman diharapkan terus menggali potensi-potensi yang masih ada di Kabupaten Sleman dan meningkatkan intensifikasi PAD.
2. Ditinjau dari segi realisasi penerimaan PBB, diperlukan upaya konkrit dari pihak BKAD Kabupaten Sleman agar lebih efektif dalam pemungutannya. Misalnya, dengan melakukan

peningkatan kompetensi dan kapasitas petugas/pegawai, peningkatan sosialisasi tentang pajak dan peraturan daerah, peningkatan manajemen keuangan yang akuntabel, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

KETERBATASAN

1. Penelitian ini hanya menghitung tingkat efektivitas dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan belum menghitung sumber pajak lainnya.
2. Penelitian ini belum menganalisis desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi di Kabupataen Sleman

PENELITIAN SELANJUTNYA

Penelitian selanjutnya akan meneliti hubungan tingkat kemandirian keuangan (komponen derajat desentralisasi fiskal atau ketergantungan fiskal) dengan pertumbuhan ekonomi untuk Kabupaten Sleman khususnya dan propinsi D.I Yogyakarta.

UCAPAN TERIMA KASIH

Lembaga Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)

REFERENSI

- Ariyansyah, M. Amir Amri dan Achmad, Erni 2014 “Tingkat Ketergantungan Fiskal dan Hubungannya dengan Pertumbuhan Ekonomi di kota Jambi,” *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah* Vol. 1 No. 1,
- Daling, Marchelino. 2013. “Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara”. *Jurnal EMBA*, 1 (3): 2303-1174.
- Damaiyanti, N. P. D & Setiawan, I. P. E. 2014. “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan PBB Terhadap PAD Kota Denpasar Tahun 2009-2013”. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 9(1), 97-105.
- Ditjen Pajak. Tersedia: <http://www.pajak.go.id/files/BookletPBB>. (diakses 15 Mei 2018 pukul 23.00)
- Dollery, Brian. 2009. “Local Government Reform and Local Government Finance”. *Journal of New England University*.
- Efektivitas Pajak daerah. Tersedia: www.kepmendagri.go.id. (diakses 31 Mei 2018 pukul 13.57)
- Faud, M. Ramli. 2016. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Fauzan, M & Ardiyanto, M. D. 2012. “Akuntansi dan Efektivitas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah Di Kota Semarang Periode Tahun 2008-2011”. *Diponegoro Journal of Accounting*. 1(2), 1-11.
- Fitriani, Ni Luh Putu & Dwirandra A.A.N.B.. 2014. Penilaian Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2007-2011. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 8.1 (2014):211-227
- Halim, A dan Kusufi, M. 2014. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A dan Kusufi, M. 2017. Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Hanik, Fitri Umi dan Karyanti, 2014, “Analisis Rasio Keuangan Daerah Sebagai Penilaian Kinerja (Studi pada DPPKAD Kabupaten Semarang)”, *JABPI* Vol. 22 No. 2,
- Harefa, M. 2016. “Kendala Implementasi dan Efektivitas Pemungutan Pajak PBB-P2 Oleh Pemerintah Kota Makassar”. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*. 7(1), 67-82.

- Himmah, R. F. 2014. “Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan Kontribusi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”. *Journal Riset Mahasiswa Akuntansi*. 10(1), 1-20.
- IAI. 2013. Modul Pelatihan Pajak Terapan Bravet A dan B Terpadu. Jakarta
- Lotz, Jorgen. 2005. “Accountability and Control in the Financing of Local Government in Denmark”. *OECD Journal on Budgeting* Volume 5 – No. 2.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI.
- Olurankinse, Felix. 2012. “Analysis of the effectiveness of capital expenditure budgeting in the local government system of Ondo State, Nigeria”. *Journal of Accounting and Taxation, Adekunle Ajasin University* Vol.4(1)
- Putra, R dan Hidayat,S,2016Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Hubungannya Dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah* Vol. 3 No. 4
- Pemerintah Kabupaten Sleman. Tersedia: www.slemankab.go.id. [15 Mei 2018 pukul 22.17]
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pertiwi, R. N., et al. 2014. “Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo)”. *Jurnal Perpajakan*. 3(1), 1-7.
- Priyo Hari Adi dan Puspa D, 2009. Fenomena Ilusi Fiskal dalam Kinerja Anggaran Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* Vol.6 No.1.
- Syaparudin, Izudin dan Syamsuddin, 2013, Kinerja Keuangan Daerah Dan Hubungan Dengan Silpa Di Kabupaten Bungo,*Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah* Vol. 1 No. 1.
- Subramanyam, K.R., et al. 2012. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang No.28 Tahun 2009. Tersedia: www.djpk.depkeu.go.id. (diakses 31 Mei 2018 pukul 14.28)
- Vurry A. Nora, Suwendra I Wayan, Yudiaatmaja F, 2014. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dan Trend pada Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2004-2013. *Jurnal Bisma Jurusan Manajemen* Vol.2 No.1.
- Wardani, R & Fadhli, W. 2017. “Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Aceh Besar”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*. 2(3), 10-17.
- Yadav, Amit, et al. 2015. “Contribution of Income tax and Effects on Revenue Generation in Nepal”. *International Journal of Scientific & Engineering Research*. Volume 6, Issue 1.
- Yanusa, Abu bakar Idu. 2013. “Assessment of Financial Performance of Ankpa Local Government Council of Kogi State”. *International Journal of Social Sciences and Humanities Reviews, Kogi State University* Vol.4 No.1